



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SINGGIH RIYADI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 28591

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 270.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI COLT T-120 Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, SUZUKI FW 110 SCD Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
5. MOBIL, CHEVROLET JEEP TROOPER Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. MOTOR, HONDA V1J02Q50L1 A/, PCX 160 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
7. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 34.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 45.200.000



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.349.700.000

III. HUTANG

Rp. 553.102.100

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 796.597.900

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.